

Peran Masyarakat dalam Mengatasi Rasa Nasionalisme sebagai dasar dari Moderasi Beragama demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

Rakha Putra Setya¹ Zaenul Slam²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: rakha988@gmail.com zaenul_slam@uinjkt.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan Peran Masyarakat dalam Mengatasi Rasa Nasionalisme sebagai dasar dari Moderasi Beragama demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi pustaka. Teknik pengumpulan data melalui studi komparasi melalui buku, jurnal, dan artikel-artikel yang ada di internet. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Indonesia yang berperan dalam mengatasi rasa nasionalisme di Indonesia. Analisis data penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu: pengenalan masalah, kasus dari masalah, dan upaya penanggulangan masalah. Hal ini terlihat dari: Dengan zaman yang berkembang dan sedang mengalami tahapan disintegrasi nasional menimbulkan kekhawatiran sejumlah masyarakat akan isu konflik-konflik yang ada. Salah satu penyebab utama konflik adalah beragamnya paham agama, multikultural, dan multietnis yang ada di Indonesia. Disintegrasi nasional juga salah satu ancaman yang sangat berbahaya dan dapat memecah belah sebuah bangsa karena merupakan salah satu aspek yang mengurangi rasa cinta tanah air kita sebagai dasar dari persatuan NKRI. Rasa Nasionalisme merupakan sikap yang paling utama dalam menanggulangi permasalahan moderasi beragama serta kerukunan yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Nasionalisme, Moderasi Beragama, Konflik, Multikultural, Disintegrasi Nasional.

Abstract

The purpose of this study is to explain society's role in overcoming the sense of nationalism as the basis of religious moderation for the sake of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research is a qualitative literature study—data collection techniques through comparative studies through books, journals, and articles on the internet. The subject of this research is the Indonesian people who play a role in overcoming the sense of nationalism in Indonesia. Data analysis of this research is divided into three stages: introduction of problems, cases of issues, and efforts to overcome difficulties. This can be seen: In an era that is developing and undergoing a stage of national disintegration. Several people are worried about the issues of existing conflicts. One of the leading causes of contention is the diversity of religious, multicultural, and multiethnic understandings in Indonesia. National disintegration is also a dangerous threat and can divide a nation because it is one aspect that reduces the love for our homeland as the basis of the unity of the Republic of Indonesia. Nationalism is the most crucial attitude in overcoming the problems of religious moderation and harmony in Indonesia.

Keywords: Nationalism, Religious Moderation, Conflict, Multicultural, National Disintegration.

Pendahuluan

Setelah berakhirnya era reformasi, zaman sekarang banyaknya indikator tentang memudarnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan generasi sekarang menjadi semakin tidak peduli

terhadap negaranya sendiri, semangat keberagaman dari kebersamaan pun terasa semakin menghilang sejak beberapa tahun terakhir, masyarakat kita sedang bertarung melawan budaya barat yang belum juga teratasi, menjadi salah satu penyebab dari memudarnya rasa nasionalisme pada Indonesia tercinta.

Media sosial yang berperan sebagai salah satu sumber informasi, memiliki tugas untuk menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Beragamnya bentuk media sosial bisa memungkinkan berbagai cara nasionalisme disampaikan. Lewat komunikasi maupun interaksi yang merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Sejak lahir dan selama proses kehidupannya, manusia tidak akan lepas dari tindakan-tindakan dari bentuk komunikasi maupun interaksi tersebut (Hereyah 2018). Dampak budaya barat atau yang seringkali kita kenal menggunakan istilah “westernisasi” telah terlihat jelas pada zaman modern ini. Dimana pola kehidupan bermasyarakat semakin hari semakin memudar pada pola modernis dengan searah kepada sistem budaya Barat (Westernisasi), yang diklaim menjadi kebudayaan yang mengikuti tren atau menjadi cara lain dari budaya masa sekarang. serta ini terjadi pada semua kalangan baik itu anak-anak, remaja, juga orang dewasa yang begitu ringkih mendapatkan peradaban-peradaban asing menjadi sesuatu yang mereka banggakan.

Pengaruh budaya ini memang tidak dapat dihindari di zaman yang semakin canggih ini, proses interaksi dan komunikasi antar bangsa di dunia melalui media sosial, kunjungan wisatawan asing, dan program lainnya semakin meningkat hari demi hari. Sedangkan proteksi untuk menghadapi arus pengaruh budaya ini sangat lemah di masyarakat, sehingga merekapun mulai meninggalkan jati diri sebagai bangsa yang berbangsa Indonesia, tanpa mengenal batas-batas ajaran agama dan moralitas budaya. Disamping itu, pola berasal westernisasi barat yang tidak sesuai menggunakan nilai-nilai Islam dikhawatirkan akan menghambat moral umat Islam serta menghentikan arus kebangkitan agama Islam dan mendorong kaum Muslimin melenceng dari ajaran kepercayaan Islam. Upaya ini terlihat konkret terjadi melalui media umum dan hiburan yang berupa seni, tarian, dramatisasi, serta cinta menjadi unsur pokok masuknya westernisasi (Suharni 2015)

Kebudayaan merupakan konsep yang fundamental sebagai sesuatu yang mencakup semua aspek seperti pengetahuan, seni, nilai-nilai sosial, pengadilan hukum, dan keterampilan serta perilaku lain yang diterima oleh orang dan anggota masyarakat sekitar. Dari konsep ini dapat dikatakan bahwa kebudayaan adalah aset yang dibuat langsung oleh manusia itu sendiri, sedangkan kebudayaan juga membentuk manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konteks budaya manusia dipandang sebagai sesuatu yang simbolik, makhluk yang penuh dengan simbol dan makhluk budaya yang kehidupannya dibentuk untuk sebuah aset yang berdasar kepada budaya itu sendiri. Apalagi kebudayaan tidak diwariskan melalui kode genetik, melainkan melalui proses mempelajari nilai dan norma kebudayaan yang dialami oleh manusia selama hidupnya, proses interaksi sebuah tradisi, tarian, dan lain sebagainya.

Budaya non-fisik memiliki hubungan erat dengan perkembangan zaman, karena bersifat dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pengertian kebudayaan populer banyak yang berkaitan dengan masalah keseharian yang

dirasakan oleh semua orang. Globalisasi yang kita kenal selalu berkaitan dengan konsep westernisasi. Globalisasi dan westernisasi memang sangat berkaitan, karena globalisasi itu sendiri merupakan proses atau strategi negara-negara barat untuk memperluas jaringan mereka, termasuk secara budaya (Alfadhil, Anugrah, and Alfidhin Hasbar 2021)

Menurut (Moesa 2007), hubungan antara moderasi beragama dengan negara dalam konteks Indonesia ternyata menjadi bahan persoalan yang penting di dalam keislaman dan keindonesiaan. Meskipun, bagi para kiai, persoalan antara agama dengan negara bukan merupakan masalah yang sangat penting dan mendasar, sebagaimana bagi kaum yang hidup di zaman modern, hal itu tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki pemahaman yang menarik diantara keduanya. Di dalam melihat hubungan antara moderasi beragama dan negara, menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai agama, suku, dan bahasa dan juga oleh wilayah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jika masing-masing elemen bangsa melihat kepentingan golongan atau pribadinya sendiri maka Indonesia akan mengalami tidak terlaksananya integrasi sosial yang berujung pada keruntuhan bangsa dan negara ini. Dalam konteks ini, nasionalisme bisa menjadi sesuatu yang mengikat dengan syarat adanya komitmen terlebih dahulu untuk menjamin kedaulatan rakyat di depan negara. Siapa yang bertanggung jawab terhadap nasionalisme, tentu saja adalah semua orang yang ada di dalam NKRI, baik atas nama agama, suku, kelompok, atau golongan manapun yang ada di NKRI.

Dengan ungkapan lain moderasi beragama sepakat untuk mempertahankan dan memantapkan nasionalisme Indonesia tanpa membedakan garis kepentingan agama, umat, suku, kelompok, golongan, maupun kepentingannya sendiri. Mereka berkomitmen untuk tetap berpegang teguh kepada nasionalisme dalam situasi sesulit apapun, seperti saat ini, di mana bangsa Indonesia sedang berhadapan dengan maraknya westernisasi, fanatisme dimana mana, semangat globalisasi, bahkan rasis antar agama. Keragaman budaya (multikultural) merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksinya beragam tidak hanya di masyarakat tetapi juga semua kalangan yang ada di wilayah tersebut berbeda-beda. Dalam masyarakat multikultural, interaksi sesama manusia cukup tinggi keberadaannya, sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam melakukan interaksi perlu dimiliki setiap anggota masyarakat. Kemampuan tersebut menurut (Akhmadi 2019), mencangkup tiga wilayah, yaitu: affiliation (kerja sama), cooperation and resolution conflict (kerjasama dan penyelesaian konflik), kindness, care and affection/emphatic skill (keramahan, perhatian, dan kasih sayang).

Keragaman suku, ras, agama, perbedaan bahasa dan westernisasi yang terjadi di Indonesia sering berbuntut berbagai konflik. Konflik di masyarakat yang bersumber pada kekerasan antar kelompok yang marak terjadi di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam Negara-Bangsa Indonesia, betapa rendahnya pengertian antar kelompok merupakan pemicu terjadinya konflik di masyarakat ini. Konflik dan kekerasan sudah termasuk ke dalam berbagai lingkungan masyarakat. Faktor yang mendorong tindak-tanduk kekerasan yang selama ini terjadi seringkali merupakan akar terjadinya konflik yang tertangani secara keliru. Konflik merupakan penyebab bagi

kekerasan, karena dibalik setiap bentuk kekerasan terdapat konflik yang belum terselesaikan.

Bagi para penyuluh agama sebagai pelayanan publik, maka fenomena keragaman budaya mengharuskan para penyuluh memahami pengetahuan dan kesadaran multikultural, sehingga memiliki peran dalam menghadapi perbedaan, sekecil apapun perbedaan kelompok binaannya. Penyuluh perlu meningkatkan sudut pandang mereka, mencukupkan diri dengan pengetahuan tentang keragaman budaya, memahami adanya bentuk-bentuk diskriminasi, serta rasisme yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, semua warga negara Indonesia termasuk masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalisme yang cinta tanah air dalam mengatasi konflik dan melakukan konsultasi kepada pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan keharmonisan kelompok yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta semboyan negara Indonesia yaitu “Bhineka Tunggal Ika”.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif studi pustaka. Metode penelitian kualitatif adalah pokok pembahasan yang diterapkan bukan hanya gejala-gejala sosial, tetapi makna-makna yang terdapat di balik tindakan-tindakan perorangan yang mendorong terwujudnya gejala-gejala permasalahan sosial tersebut. Oleh karena itu, metode yang utama dalam ilmu sosial dari Max Weber adalah *Verstehen* atau pemahaman. Untuk memahami makna yang ada di dalam kasus, seorang peneliti harus berperan sebagai pelaku yang ditelitinya (Gunawan 2022), Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian (Darmalaksana 2020). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistika atau dengan cara pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan kita sehari-hari yang dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif juga menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu penelitian. Hal terpenting suatu penelitian yang berupa studi pustaka dan fakta-fakta objektif adalah makna dibalik pengembangan konsep teori. Hal ini juga bertujuan memahami fakta yang dialami oleh subjek penelitian. Teori-teori yang disusun dalam penelitian kualitatif bersifat menguji ilmu pengetahuan berdasarkan atas prinsip yang sistematis dan dengan proses yang intensif (Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri 2019). Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka, pengolahan metode menganalisis studi banding antara buku-buku yang ada untuk menjadikan referensi dalam penelitian ini (Sahputri 2020).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasa nasionalisme merupakan suatu perasaan yang tumbuh dari hati seseorang untuk mengabdikan, memelihara, membela, serta melindungi tanah airnya dari seluruh ancaman dan juga gangguan. Jadi, rasa nasionalisme berkesinambungan dengan cinta tanah air wilayahnya sehingga tetap waspada serta siap membela tanah air Indonesia dari segala bentuk tantangan yang ada, kendala dan gangguan yang mampu membahayakan keberlangsungan hidup bangsa serta negara.

Dalam pandangan Islam, kata nasionalisme tidak disebutkan langsung dalam Al-Qur'an. Akan tetapi nilai-nilai yang terkandung banyak ditemukan di kitab suci Al-Qur'an diantaranya nasionalisme dan rela berkorban terhadap negaranya sendiri. nasionalisme dalam perspektif Islam terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa kesatuan asal-usul manusia terbentuk dari wilayahnya sendiri.

Perkembangan Zaman Modern dan Rasa Nasionalisme Masyarakat Indonesia.

Pada zaman modern yang disebut juga sebagai era milenial, yaitu zaman dimana orang yang lahir setelah adanya internet yang memberi kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Zaman ini ditandai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) baru, seperti kecerdasan buatan (*AI, Artificial Intelligence*), robotik, bahkan analisis data. Setiap orang mampu melakukan apapun yang ingin dilakukan dengan hanya memanfaatkan teknologi. Revolusi industri yang sangat cepat ini mengakibatkan banyak perubahan yang dialami manusia, seperti perubahan pola pikir, pola hidup maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Zaman ini akan mengubah aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tak hanya pada bidang teknologi saja melainkan pula pada aspek lain seperti ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan sosial.

Dalam sudut pandang ekonomi dapat dilihat dari perkembangan transportasi yang ada dan semakin maju. Hal ini dapat dilihat dengan hadirnya kendaraan-kendaraan yang berbasis aplikasi atau yang lebih dikenal dengan aplikasi online. Dalam bidang sosial, yaitu adanya interaksi sosial yang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, bersifat luas dengan hadirnya akses internet dan teknologi. Dalam bidang budaya, yaitu banyaknya akulturasi yang berkaitan dengan tarian budaya barat seperti K-pop, idol, dan lain sebagainya. Hal yang sama juga terjadi dalam bidang politik, kemudahan aksi politik yang didukung oleh perangkat dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) melalui gerakan berbasis sosial media. Dan dalam bidang pendidikan, yaitu beredarnya aplikasi Learning Management System yang pada saat ini sudah diterapkan pada satuan pendidikan yang mendukung kemajuan era teknologi (Safa Amalia 2020).

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta globalisasi sendiri dapat memberikan dampak negatif seperti sikap solidaritas atau kepedulian, gotong royong, kesetiakawanan berkurang. Kreativitas menurun, karena individu kebanyakan bersikap konsumtif. Budaya dan adat istiadat bangsa kita perlahan-lahan mulai terkikis. Informasi tidak terkendali dan tidak tersaring menimbulkan

berita yang tidak berdasarkan fakta dimana-mana seperti yang kita kenal sebagai berita hoax. Perusahaan dalam negeri yang akan kalah saing dengan perusahaan luar negeri, hal ini mengakibatkan perusahaan yang berada di dalam negeri akan sulit berkembang. Perilaku dan sikap nasionalisme yang mulai berkurang. Munculnya sikap ala kebarat-baratan yang menjadi salah satu gaya hidup sehari-hari. Budaya yang menjadi identitas sebuah bangsa menjadi terkontaminasi.

Di perkembangan globalisasi ini Negara kita tidak dapat mengucilkan diri tanpa berhubungan dengan Negara lain. Suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan hubungan internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional, itulah yang sering dikenal sebagai politik luar negeri. Dalam mengembangkan hubungan dengan dunia internasional, Indonesia menerapkan sebuah sistem yang diberi nama politik luar negeri bebas aktif. Bebas berarti Indonesia tidak memihak keliru satu blok kekuatan-kekuatan yang terdapat pada global ini. Aktif berarti Indonesia dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya selalu ikut serta pada menuntaskan persoalan-persoalan yang berafiliasi menggunakan dilema internasional (Rostini 2018).

Sejarah Pemberontakan Sebuah Kelompok yang Mayoritas dan Mengurangi Rasa Nasionalisme terhadap Indonesia.

Berkaitan dengan berkembangnya zaman Indonesia juga pernah mengalami pemberontakan-pemberontakan yang disebabkan oleh mayoritas sebuah kelompok, salah satunya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang ingin membentuk sebuah negara bersyariat Islam atau Negara Islam Indonesia disinyalir sebagai akar dari terorisme yang terjadi di Indonesia.

Darul Islam sebagai kelompok Separatisme di Indonesia dengan ideologi Syariat Islamnya memberontak di beberapa wilayah Indonesia. Salah satu wilayah pemberontakannya adalah di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Qahar Muzakkar. Konflik dimulai dari tentang siapa yang diterima dalam tentara dan permasalahan yang lebih pribadi bahwa Qahar ditolak menjadi jenderal divisi Hasanuddin yang bermarkas di Sulawesi.

Menurut Qahar, Batalion Hasanuddin harus mencangkup semua pejuang yang terlibat dalam revolusi. Namun, pemerintah pada saat itu tidak menerima semua mantan pejuang kemerdekaan tersebut. Dengan alasan apabila menerima semuanya maka akan melebihi kapasitas finansial yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Alasan Qahar tidak diberi posisi Komandan Divisi Hasanuddin, meski Qahar sudah mencapai Letnan Kolonel, yang dikhawatirkan kecenderungan sosial politiknya dapat mengakibatkan revolusi sosial terhadap kaum yang berada di Sulawesi Selatan.

Pemerintah pada saat itu berusaha mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Sulawesi Selatan, dengan perundingan-perundingan masalah pengurangan jumlah penggabungan satuan-satuan tentara menemui jalan buntu dan Qahar tetap pada prinsipnya, dan pada bulan Juli 1950 Qahar Muzakkar bergabung dengan sekitar 20.000 Prajurit yang menolak untuk didemobilisasikan. Setelah perundingan selanjutnya gagal, Qahar lari ke daerah pegunungan dan dari wilayah

itulah Qahar melaksanakan aksi pemberontakan secara terbuka. Dan pada tahun 1952 Qahar menghubungi Kartosoewirjo dan secara resmi menjadikan pemberontakannya yang saat ini dikenal dengan nama gerakan Darul Islam (Ricklefs 2008).

Dengan tujuan membentuk Negara Islam Indonesia yang Bersyariat Islam. Qahar Muzakkar memproklamasikan Sulawesi Selatan dan daerah yang berada disekitarnya menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1953 yang berlokasi di Buntu Susu (Baraka) yang terletak di Kabupaten Enrekang, dan sekaligus menjadi markas DI/TII di Sulawesi Selatan.

Sebelum terjadinya pemisah Negara Indonesia Timur di bawah kepemimpinan Qahar Muzakkar, terjadi perbedaan pendapat di Jakarta mengenai posisi Qahar Muzakkar untuk menangani kaum pemberontak di wilayah Indonesia Timur yang menginginkan pemerintahan yang federalisme. Namun, keinginan tersebut ditolak kembali mentah-mentah Kolonel Kawilarang dari Minahasa sebagai komandan wilayah Indonesia Timur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kemudian Kolonel Kawilarang secara sepihak mengeluarkan dekret pembubaran KGSS (Kelompok Gerilya Sulawesi Selatan).

Penolakan inilah yang membuat Qahar Muzakkar sangat marah dan selanjutnya bergabung dengan kelompok gerilya dan mulai memblokir jalan-jalan utama Sulawesi Selatan. Perseteruan militer dengan kelompok Qahar Muzakkar semakin meruncing sampai terjadinya konvensi sementara, para gerilyawan dilebur sebagai "Corps Tjadangan Nasional" (CTN) yang terdiri atas lima batalion. Proses seleksi gerilyawan dianggap tidak adil oleh kelompok Qahar Muzakkar ditanggapi dengan cara perang gerilya dan mereka mendapatkan gelar "Tentara Hutan".

Diproklamasikannya Negara Islam Indonesia oleh Qahar Muzakkar membuat hubungan-hubungan semakin terpecah antara Darul Islam dengan Republik Indonesia. Namun dalam kawasan daerah kekuasaan DI/TII sebagian menolaknya dengan alasan mengedepankan Pancasila sebagai dasar negara. Pemberontakan yang berlangsung lebih dari satu dasawarsa ini membuat kekacauan yang serius dan membuat pemerintah harus bekerja keras dalam menumpas gerakan DI/TII yang berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia (Harianto 2022).

Keberagaman Indonesia yang Multikultural dan Multietnis Menyebabkan Runtuhnya Sikap Nasionalisme Masyarakat Indonesia

Indonesia yang merupakan negara yang multikultural dan multietnis beragam kebudayaan tidak terlepas dari fenomena ini. Dalam sejarahnya, pembentukan Indonesia sebagai negara-bangsa didasarkan pada persetujuan bersama berbagai kelompok etnis yang ada di Indonesia. Mereka yang sama-sama mengalami penderitaan akibat kolonialisme digerakan oleh sebuah sentimen nasionalisme yang berniat merebut kemerdekaan dan bersatu dalam bentuk sebuah negara. Pasca jatuhnya kepemimpinan pemerintahan Soeharto yaitu Orde Baru di tahun 1998, ada fenomena memprihatinkan berupa berkembang dan sangat kuatnya permasalahan-permasalahan lokal di berbagai daerah yang terdapat di Indonesia. Kemajuan demokrasi yang sedang terjadi di Indonesia pada satu sisi memang sudah

memberikan kebebasan yang lebih luas kepada rakyat Indonesia, tetapi pada sisi lain, justru terkuak juga kerapuhan proses pembangunan bangsa.

Konflik lokal makin sering terjadi dan menimbulkan dampak yang sangat parah. Sebagai contoh konflik di Sambas antara etnis Melayu dan Madura yang terjadi pada tahun 1999 telah mengakibatkan 150 orang meninggal dan sekitar 10.000 orang menjadi pengungsi. Sementara itu, konflik di Ambon menyebabkan tidak kurang 3.000 orang meninggal dunia. Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia memang sangat sulit untuk diterima oleh akal manusia karena setiap konflik memiliki penyebabnya sendiri dan dinamika yang berbeda. Dimensi permasalahan yang menyebabkan konflik-konflik tersebut berkembang memang sangat beragam, mulai dari politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konflik di Indonesia harus berada pada tempat yang kompleks membahas konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang lebih luas.

Berbagai konflik lokal yang terjadi di Indonesia khususnya pasca jatuhnya Presiden Soeharto ditanggapi dengan serangkaian kebijakan penanganan yang beragam dari masa pemerintahan mantan Presiden B.J Habibie hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa Habibie, kebijakan penanganan konflik pemerintah Indonesia yang paling berkesan adalah keputusan untuk menyelenggarakan jejak pendapat mengenai masa depan dari salah satu wilayah yang berada di Timur yaitu Timor Leste pada bulan Juli 1999 yang berujung kepada lepasnya wilayah Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketika keputusan tersebut diambil, banyak pihak yang beranggapan mengenai adanya kepentingan aktor-aktor internasional di Timor Leste. Selain itu, masuknya aktor internasional seperti Australia juga telah membentuk wacana tersendiri mengenai internasionalisasi konflik lokal yang ada di Indonesia.

Meskipun wilayah lokal dari konflik-konflik tersebut relatif banyak yang mengetahui, mengisolasi konflik semata-mata hanya dalam lingkup domestik cenderung akan membatasi secara cermat dan komprehensif terhadap akar masalah konflik sekaligus kemungkinan menemukan solusi atas konflik-konflik tersebut. Hal ini dikarenakan dalam konflik lokal juga terkandung paham-paham internasional yang cukup signifikan. Ada kecenderungan bahwa selain faktor dalam negeri, konflik-konflik lokal tersebut juga dipengaruhi oleh dinamika internasional. Selain itu, analisis hukum internasional berdasarkan prinsip determinasi diri dan konsep separatis itu juga perlu dilakukan, mengingat konflik lokal seharusnya tidak dipecahkan dengan kekuatan politik tetapi melalui rangkaian hukum (Hadi 2007).

Kelompok keturunan cina di Indonesia sering dianggap sebagai sasaran tunggal kerusuhan massal (etnis) di Indonesia, seperti yang terjadi di Medan dan Jakarta. Kesan untuk menggeneralisir sasaran kerusuhan etnis ini terutama yang disiarkan pers luar negeri pada permulaan gerakan reformasi ternyata tidak benar (Pelly 1999). Gerakan reformasi telah memberikan momentum untuk membangkitkan perlawanan dengan menggunakan label etnis dan agama tersebut. Konflik terbuka seperti di Medan, Jakarta, Sambas-Singkawang, dan Ambon pada hakikatnya adalah proses dari sosio-kultural demi mendapatkan keadilan dan suatu pernyataan bahwa tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat telah hancur oleh ambisi politik yang berkuasa. Pemaksaan dengan suatu rekayasa sosial untuk

kepentingan suatu pihak tidak akan pernah berhasil. Tidak ada sasaran tunggal (kelompok etnis tertentu) dalam kerusuhan etnis di Indonesia. Kelompok etnis Cina bukanlah satu-satunya sasaran dalam kerusuhan etnis di Indonesia. Kelompok etnis Cina bukanlah satu-satunya sasaran dalam kerusuhan etnis seperti yang selalu diberitakan oleh pers luar negeri. Masalah tersebut harus dilihat kasus per kasusnya terlebih dahulu dan dianalisis kembali.

Upaya menanggulangi Disintegrasi Nasional Bangsa Indonesia demi Terciptanya Kerukunan dan Moderasi Beragama

Kekhawatiran perihal disintegrasi (perpecahan) bangsa pada tanah air terulang kembali, yang bisa digambarkan menjadi insiden yang penuh perseteruan serta kekerasan, gelombang reformasi yang tengah berjalan menyebabkan banyak sekali paham baru yang ada pada Indonesia. Segala hal yang terkait dengan Orde Baru termasuk prinsip politik dan strukturnya dihujat serta dibongkar massal oleh rakyat Indonesia. Penyebab timbulnya disintegrasi bangsa juga dapat terjadi sebab perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pada rakyatnya khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya kekayaan alamnya berlimpah atau berlebih, sebagai akibatnya wilayah tadi bisa melaksanakan pemerintahannya sendiri secara semena-mena dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yg tinggi.

Selain itu disintegrasi bangsa juga ditentukan oleh perkembangan politik pada era tersebut. pada kehidupan politik sangat terasa adanya imbas berasal dari politik elit maupun pimpinan nasional, yang tak jarang mensugesti sendi-sendi kehidupan bangsa, sebagai akibat dari maraknya bentuk-bentuk primordialisme asal kelompok, golongan, kedaerahan bahkan agama sekalipun. Keterbatasan taraf intelektual sebagian besar warga Indonesia sangat simpel terpengaruh oleh ucapan-ucapan para pimpinannya sebagai akibatnya sangat mudah terpicu untuk melakukan aksi yang menjurus kearah terjadinya sebuah kerusuhan maupun permasalahan antar kelompok atau golongan.

Disintegrasi nasional sebetulnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Peran serta warga masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa ini adalah kewajiban yang tertera jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Masyarakat memiliki peranan penting untuk beupaya menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini dengan sebijak mungkin dan sebaik-baiknya. Upaya penanggulangan disintegrasi bangsa dalam menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia adalah membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran diri sendiri dan kehendak untuk persatuan, menciptakan kondisi yang membiasakan diri berakarkan nilai dan norma yang terkandung pada Pancasila, serta bersikap senantiasa menjunjung tinggi sikap nasionalisme terhadap bangsa Indonesia yang berasaskan kepada cinta tanah air yang beragam budaya multikultural dan multietnis (Santoso and Dawwas 2021)

Kesimpulan

Nasionalisme artinya suatu perasaan yang tumbuh berasal hati seseorang untuk mengabdikan, memelihara, membela, dan melindungi tanah airnya dari semua ancaman dan juga gangguan. Jadi, rasa nasionalisme berkesinambungan dengan

cinta tanah air daerahnya sebagai akibatnya tetap waspada dan siap membela tanah air Indonesia dari segala bentuk tantangan yang ada, kendala dan gangguan yang mampu membahayakan keberlangsungan hayati bangsa serta negara.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan siswa sebagai masyarakat negara yang cerdas dan baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. warga negara yang dimaksud ialah warga negara yang menguasai pengetahuan, perilaku serta nilai, keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air menjadi wujud implementasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila.

Dengan memperhatikan hal-hal yang mendukung perkembangan zaman yang semakin maju, bahwa sikap nasionalisme kebangsaan serta pembentukan karakter melalui penumbuhan nilai, moral, dan menekankan keseimbangan aspek kewarganegaraan.

Kiprah masyarakat disini artinya menjadi sebuah Sumber Daya Manusia (SDM) pada negara yang menjunjung tinggi perilaku cinta tanah air, meminimalisir datangnya akulturasi berasal budaya barat, dan melestarikan budaya keragaman yang terdapat pada Indonesia agar jauh dari perbuatan yang merujuk kepada radikalisme maupun terorisme yang mengancam negeri Indonesia tercinta.

Referensi

- Akhmadi, Agus. 2019. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity." *Jurnal Diklat Keagamaan* 13(2):45–55.
- Alfadhil, Dzakiy Muhammad, Agung Anugrah, and Muhammad Hafiz Alfidhin Hasbar. 2021. "Budaya Westernisasi Terhadap Masyarakat." *Jurnal Sosial-Politika* 2(2):99–108. doi: 10.54144/jsp.v2i2.37.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 1–6.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Vol. 53.
- Gunawan, Imam. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Hadi, Syamsul. 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hariato. 2022. "Perlawanan DI / TII Terhadap Negara." *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 10(1). doi: <http://dx.doi.org/10.24127/hj.v10i1.2453>.
- Hereyah, Yoyoh. 2018. "Makna Nasionalisme Dalam Iklan " Karya Indonesia Adalah Kita " Oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia." *Jurnal Semiotika* 12(2). doi: <http://dx.doi.org/10.30813/s;jk.v12i2.1720.g1448>.
- Moesa, Ali Machsana. 2007. *Nasionalisme Kiai;Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Lkis Pelangi Aksara.
- Pelly, Usman. 1999. "Akar Kerusakan Etnis Di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik Dan Disintegrasi Nasional Di Era Reformasi." *Tropologi Indonesia* 5. doi: 10.7454/ai.v0i58.3363.
- Ricklefs, Merle Calvin. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT.

Ikrar Mandiriabadi.

- Rostini, Toti. 2018. "Konsep Globalisasi Dan Sikap Cinta Tanah Air Melalui Metode Diskusi Pada Mata Pelajaran." 5(September):157–70.
- Safa Amalia. 2020. "Menampilkan Sikap Cinta Tanah Air Pada Era 4.0." *Jurnal Edukatif* 4(01)(1):68–75.
- Sahputri, Hendri. 2020. "Upaya Peningkatan Kemampuan Belajar Siswa Kelas IV Dalam Pendidikan Berkarakter Dengan Pendekatan Metode Studi Pustaka." *Serambi Konstruktivis* 2(4):1–9.
- Santoso, Agus Budi, and Rizal Dawwas. 2021. "Eksaminasi : Jurnal Hukum Upaya Penanggulangan Disintegrasi Nasional Dalam Menjaga Persatuan Indonesia." 1(1):20–26.
- Suharni. 2015. "WESTERNISASI SEBAGAI PROBLEMA PENDIDIKAN ERA MODERN." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 1:1—16.